

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab III penelitian ini membahas mengenai hasil temuan penelitian sesuai dengan hasil wawancara tentang “Upaya Pelayanan Prima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2024”. Pada penelitian ini teknik wawancara dilakukan secara langsung, dengan narasumber dalam penelitian, yaitu Khikmatun, S.Pd.I. selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Ida Susanti, S.E. selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

#### **3.1. Upaya Mewujudkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas**

Untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan adil, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkomitmen dalam menyediakan layanan yang ramah bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melakukan berbagai upaya guna meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi para penyandang disabilitas. Langkah utama yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemilih disabilitas, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan informasi mengenai tata cara pencoblosan, serta hak-hak mereka dalam pemilu. Sosialisasi ini dilakukan dengan pertemuan langsung

dengan mengadakan pelatihan pemungutan suara, hal ini dilakukan untuk memastikan agar para penyandang disabilitas ini memahami tahapan pencoblosan dan dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 (batangkab.go.id, 2024)



Sumber : Facebook KPU Kabupaten Batang

### **Gambar 3. 1 Sosialisasi Penyandang Disabilitas**

Pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pemilu. Salah satunya adalah diperkenalkan enam jenis surat suara yang digunakan dalam pemilihan umum. Setiap jenis surat suara ini memiliki fungsi spesifik sesuai dengan tingkatan pemilihan yang sedang berlangsung, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, serta surat suara khusus dengan huruf Braille.

Keberadaan surat suara dengan huruf Braille ini merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam memastikan inklusivitas dalam proses demokrasi. Surat suara ini diperuntukkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, pemilih tunanetra tetap dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan cara yang lebih mandiri dan rahasia. Selain penyediaan surat suara khusus bagi pemilih disabilitas netra, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang juga menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dalam berbagai sesi pelatihan dan sosialisasi terkait Pemilu 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pemilu dapat diakses secara optimal oleh pemilih dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Kehadiran penerjemah bahasa isyarat memungkinkan pemilih tunarungu untuk memahami tata cara pemungutan suara, proses administrasi pemilu, serta hak-hak mereka sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam demokrasi.

Langkah kedua adalah penyediaan fasilitas yang aksesibel mencakup lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk penyediaan jalur landai untuk pengguna kursi roda serta lokasi TPS yang tidak berada di tempat yang menyulitkan,

seperti di lantai atas tanpa akses lift atau jalan berbatu. Selain itu, antrean yang ramah disabilitas juga diterapkan, misalnya dengan memberikan prioritas bagi pemilih dengan keterbatasan fisik agar tidak perlu menunggu terlalu lama dalam antrean. Selain itu desain surat suara harus memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas, terutama mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Untuk pemilih tunanetra, Komisi Pemilihan Umum menyediakan template surat suara braille, yang memungkinkan mereka mencoblos secara mandiri dengan mengenali nama dan nomor pasangan calon melalui huruf braille. Bagi pemilih disabilitas yang mengalami kesulitan dalam memberikan suara secara mandiri, Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan mereka didampingi oleh orang yang dipercaya. Pendamping tersebut wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih dan harus mengisi formulir pendampingan sebelum memasuki bilik suara. Formulir ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban agar proses pendampingan dilakukan sesuai aturan dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas pemilu yang jujur dan adil.

### **3.2. Upaya Pelayanan Pada Pendistribusian Logistik Pemilu.**

Tantangan geografis dan bencana alam menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang yang menyebabkan putusnya jembatan penghubung antara dukuh, menyebabkan logistik kotak suara dan perlengkapan untuk pencoblosan mengalami

hambatan, sehingga pengiriman logistik tidak dapat dikirim dengan cepat melewati jalur yang semestinya dilalui. Meskipun dihadapkan pada hambatan ini, tidak mengurangi bentuk pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya dan langkah yang strategis untuk mengatasi kendala ini agar pelayanan selama proses pemilu kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

### **3.3. Upaya Penanganan Hambatan Geografis Dalam Proses Distribusi**

#### **Logistik**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menangani kendala geografis ini, yaitu dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di Desa Pranten. Melalui komunikasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dapat menggali kendala yang ada sehingga dapat memunculkan solusi yang tepat untuk proses distribusi logistik di Desa Pranten, yaitu dengan mengubah rute distribusi melalui jalur memutar melewati Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dilakukan agar proses distribusi logistik pemilu sampai ke tujuan dengan aman, tanpa rusak, dan tanpa kendala yang berarti. Kedua, dengan menurunkan anggaran lebih untuk menyewa kendaraan khusus yang telah terbiasa beroperasi di medan yang sulit, serta memiliki pengalaman melintasi wilayah tersebut. Dengan

menggunakan kendaraan khusus yang telah disesuaikan berdasarkan medan wilayah tersebut, proses distribusi logistik pemilu dapat dilakukan hingga ke daerah titik tujuan dengan aman dan efisien.

### 3.4. Upaya Meminimalisir Gangguan Pada Proses Distribusi Logistik

#### Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang memiliki beberapa strategi mitigasi dalam upaya untuk meminimalisir gangguan selama proses pemilu berlangsung, yang pertama adalah dengan pemetaan wilayah yang ada di Kabupaten Batang secara menyeluruh.

| AKSESIBILITAS DISTRIBUSI LOGISTIK DARI KABUPATEN/KOTA SAMPAI KE PPS                    |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| KPU Kabupaten/Kota : KPU KABUPATEN BATANG                                              |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
| Jumlah Kecamatan : 15                                                                  |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
| Jumlah Kelurahan/Desa : 248                                                            |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
| Anggaran Distribusi dari Kab/Kota ke KPPS Pemilu Tahun 2019 : Rp 611.725.000           |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
| Perkiraan Anggaran Distribusi dari Kab/Kota ke KPPS Pemilu Tahun 2024 : Rp 647.075.000 |                         |                              |               |                         |                          |                            |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 |                                       |                      |                   |            |
| NAMA KECAMATAN                                                                         | NAMA<br>KELURAHAN/ DESA | JUMLAH<br>PEMILIH<br>(ORANG) | JUMLAH<br>TPS | JARAK<br>TEMPUH<br>(KM) | WAKTU<br>TEMPUH<br>(JAM) | JENIS TRANSPORTASI         |                         |             |              |                                          |                                |            |                                 | KENDALA                               |                      | AKSESI<br>BILITAS |            |
|                                                                                        |                         |                              |               |                         |                          | Jalan Kaki/Diplasi/Gerobak | Angkutan Tenaga Manusia | Sepeda Kaki | Sepeda Motor | Motor Angkutan/Kapal/Double Gorden (Ked) | Truk Engkel/Truk Double Gorden | Kereta Api | Kapal Kargo/Sampah/Perahu/Gerek | Speedboat/Kapal Motor/Truk Laut/Kapal | Prasmanan/Helikopter |                   | Helikopter |
| WONOTUNGGAH                                                                            | SILURAH                 | 1.388                        | 6             | 27.2                    | 55 menit                 | -                          | -                       | -           | -            | √                                        | -                              | -          | -                               | -                                     | -                    | -                 | Mudah      |
| WONOTUNGGAH                                                                            | SODONG                  | 1.332                        | 5             | 22.2                    | 35 menit                 | -                          | -                       | -           | -            | √                                        | -                              | -          | -                               | -                                     | -                    | -                 | Mudah      |
| WONOTUNGGAH                                                                            | GRINGINGSARI            | 1.530                        | 7             | 21.2                    | 50 menit                 | -                          | -                       | -           | -            | √                                        | -                              | -          | -                               | -                                     | -                    | -                 | Mudah      |
| WONOTUNGGAH                                                                            | KEDUNGMALANG            | 2.252                        | 8             | 20.2                    | 30 menit                 | -                          | -                       | -           | -            | √                                        | -                              | -          | -                               | -                                     | -                    | -                 | Mudah      |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

#### Gambar 3. 2 Pemetaan Wilayah Distribusi Logistik

Gambar di atas merupakan dokumen pemetaan aksesibilitas lokasi wilayah TPS yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam mengidentifikasi daerah mana saja yang berpotensi memiliki

hambatan, terdapat tiga aspek utama dalam pemetaan ini. Pertama, pemetaan pada wilayah dengan aksesibilitas yang sulit dijangkau karena medan dan akses jalannya yang terbatas, kedua daerah yang memiliki potensi rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor, lalu yang ketiga jenis transportasi yang digunakan selama pendistribusian pada lokasi yang telah dipetakan. Selain pemetaan aksesibilitas wilayah pada distribusi logistik, pemetaan juga dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi gangguan sosial seperti konflik ketegangan politik atau kerawanan terhadap tawuran akibat perbedaan politik. Pemetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama proses pemilu berlangsung, sehingga langkah ini penting untuk keberlangsungan jalannya pemilu.

Upaya yang kedua yaitu, melakukan observasi pada daerah yang memiliki potensi rawan akan bencana alam. Sebagai contoh di daerah Desa Gerlang yang sering mendapatkan laporan terkait wilayahnya yang kerap terjadi longsor, dalam upaya mitigasi ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mengumpulkan informasi dan melakukan observasi langsung ke daerah tersebut. Observasi ini dilakukan untuk memastikan apakah ancaman longsor masih ada atau sudah berkurang, jika setelah dilakukan pengecekan tidak terdapat indikasi bahaya maka wilayah tersebut dinyatakan aman dan tidak perlu tindakan lanjutan. Namun, jika masih terdapat kemungkinan terjadi longsor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang akan mengambil tindakan strategis untuk menindak lanjuti masalah yang terjadi. Pada pemilu, jika suatu daerah memiliki hambatan seperti

banjir atau longsor solusi yang diterapkan adalah dengan pemecahan TPS dengan jarak tempuh TPS yang tidak terlalu jauh dari lokasi rumah pemilih. Jumlah pemilih dalam satu TPS dibatasi maksimal 250 sampai 300 orang per TPS untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

### **3.5. Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Dalam Menjamin Kelancaran Proses Distribusi Logistik Pemilu**

Untuk mengupayakan segala bentuk pelayanan selama proses distribusi logistik berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang tidak bekerja sendiri dalam hal ini. Komisi Pemilihan Umum telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dalam memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu. Pada proses pendistribusian logistik ke Desa Pranten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melakukan kerjasama dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) untuk membantu mencari solusi rute yang akan digunakan dengan melewati Kabupaten Banjarnegara. Selain itu dalam upaya ini pihak Komisi Pemilihan Umum juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan TNI yang bertugas dalam menjaga, memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan ke wilayah tersebut.



Sumber : *Instagram KPU Kabupaten Batang.*

**Gambar 3. 3 Kerjsama Dengan Kepolisian**

Kolaborasi selanjutnya, yakni dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). KPU Kabupaten Batang berkoordinasi dengan BMKG dengan melakukan pemantauan terkait kondisi cuaca secara real-time, serta mengidentifikasi wilayah yang rawan akan bencana alam, sehingga tim distribusi logistik dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi jika terdapat kemungkinan buruk yang dapat menghambat pendistribusian logistik akibat bencana alam. Selanjutnya, sebagai bentuk langkah mitigasi, Komisi Pemilihan Umum Batang juga berkoordinasi dengan BPBD untuk menentukan langkah yang strategis dan menyiapkan jalur alternatif terkait wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan akses pada jalur yang dilewati untuk pendistribusian logistik.

### **3.6. Pelayanan Informasi dan Edukasi Pemilih**

Sulitnya akses internet di desa-desa terpencil menjadi tantangan utama dalam penyebaran informasi mengenai pemilu. Banyak wilayah di Kabupaten Batang, terutama yang berada di daerah perbukitan masih memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara cepat melalui media digital seperti website resmi KPU atau media sosial lainnya. Hal ini menyebabkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap tahapan pemilu, daftar calon, serta tata cara pemungutan suara. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, telah melakukan upaya agar masyarakat di daerah tersebut tetap mendapatkan informasi yang memadai, sebagai berikut:

#### **3.6.1. Sosialisasi Secara Langsung**

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melaksanakan kunjungan langsung guna melakukan sosialisasi secara langsung ke desa-desa yang memiliki akses informasi terbatas. Selama kunjungan ini, petugas Komisi Pemilihan Umum memberikan penjelasan mengenai berbagai tahapan pemilu yang harus diketahui oleh masyarakat, mulai dari tahapan pendaftaran calon, pengumuman calon yang berkompetisi, hingga tata cara pemungutan suara yang benar. Penjelasan ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, mengingat beberapa warga mungkin belum terbiasa dengan istilah teknis yang biasa digunakan dalam konteks pemilu.

Selain penyampaian informasi tentang tahapan-tahapan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai daftar calon dalam pemilu. Agar komunikasi berjalan dua arah dan lebih interaktif, petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mengadakan sesi diskusi di mana warga dapat langsung mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kebingungannya mengenai pemilu. Tujuan dari diskusi ini adalah agar masyarakat merasa lebih terlibat dan aktif dalam proses sosialisasi serta memastikan bahwa mereka memahami setiap detail yang berkaitan dengan pemilu.



Sumber : *Instagram @pps.mojotengah*

**Gambar 3. 4 Sosialisasi Oleh Warga**

### **3.6.2. Kolaborasi Komisi Pemilihan Umum dengan Berbagai Pihak Dalam Sosialisasi Pemilu**

Untuk meningkatkan efektivitas dari sosialisasi ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat dalam menyebarkan informasi. Keterlibatan pemerintah desa sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa, sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pesan secara langsung. Kepala desa dan perangkat desa dilibatkan dalam proses ini untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilu dan mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu.



Sumber : *Instagram @ppk\_blado*

**Gambar 3. 5 Sosialisasi Oleh Perangkat Desa**

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang juga melibatkan tokoh agama dalam proses sosialisasi pemilu, mengingat pengaruh mereka yang besar dalam membentuk pandangan dan kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada tokoh-tokoh agama, diharapkan mereka dapat membantu menyebarkan informasi pemilu secara lebih luas melalui berbagai forum keagamaan, seperti pengajian, ceramah, atau diskusi keagamaan. Masyarakat cenderung lebih menerima informasi dari pemimpin agama yang mereka hormati, sehingga keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi ini menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga menyadari bahwa pemberdayaan tokoh agama dapat menjadi jembatan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan informasi melalui saluran resmi. Dengan adanya dukungan dari tokoh agama, pesan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dapat tersampaikan dengan lebih persuasif, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.



Sumber : *Instagram @ppk\_blado*

### **Gambar 3. 6 Sosialisasi oleh Kelompok PAC Muslimat**

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap warga mengerti dengan baik cara melaksanakan hak pilih mereka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mengadakan simulasi pemungutan suara di beberapa desa. Simulasi ini dilakukan di beberapa titik yang dipilih secara strategis agar dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat. Dalam simulasi tersebut, warga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan cara mencoblos yang benar, sehingga mereka tidak akan bingung atau melakukan kesalahan pada hari pemungutan suara yang sebenarnya. Simulasi ini juga disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya memilih dengan cermat, serta cara memastikan suara mereka sah. Dengan adanya simulasi ini, masyarakat dapat merasakan langsung suasana

pemilu, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka saat menghadapi pemilu yang sesungguhnya

### **3.7. Solusi Pelayanan Keterbatasan Akses Internet Pada Penggunaan**

#### **Sirekap**

Dalam menangani permasalahan terkait keterbatasan akses internet yang secara tidak langsung memengaruhi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), sehingga proses penginputan hasil rekapitulasi suara tidak dapat diunggah secara langsung, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batang sebagai bentuk pengupayaan dalam penyediaan sarana internet yang memadai. Jika terdapat ada TPS yang masih kesulitan dalam mengakses internet atau daerahnya yang sama sekali tidak memiliki akses internet, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat menggunakan aplikasi Sirekap menjadi mode offline untuk merekam hasil penghitungan suara. Ketika datanya telah terunggah dan tersimpan pada perangkat aplikasi, para petugas dapat mengirimkan perolehan penghitungan suara ketika sudah memperoleh akses internet dengan mendatangi balai desa, maupun mencari lokasi lain yang memiliki jaringan stabil.

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan jika aplikasi Sirekap tidak dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan C-Hasil dimana hasil pemilu yang telah dihitung kemudian dicetak lalu ditempel di TPS maupun di balai

desa. Untuk memastikan agar data hasil pemungutan suara akurat dan valid, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melakukan bimbingan teknik (bimtek) kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Operator Rekapitulasi yang kemudian data tersebut akan dicocokkan oleh KPU dengan berbagai cara agar dapat memastikan data tersebut akurat.

### **3.7.1. Kerjasama Dengan Sektor Swasta, Pemerintah Dalam Upaya Penyediaan Layanan Internet**

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tentunya tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, pemerintah lainnya, dan masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah dengan melibatkan Diskominfo Batang dan Telkom dalam memastikan konektivitas kebutuhan jaringan internet agar tidak ada lagi wilayah blank spot di Kabupaten Batang.



Sumber : [kominfo.batangkab.go.id](http://kominfo.batangkab.go.id)

### **Gambar 3. 7 Kerjasama Dengan Diskominfo**

Melalui kerjasama ini wilayah-wilayah yang terkendala jaringan agar mendapatkan peningkatan akses internet. Melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang lalu bekerjasama dengan Telkom untuk melakukan pengecekan kepada warga yang memiliki usaha internet pada setiap Rt/Rw maupun business net untuk memberikan bantuan tambahan dengan dukungan peningkatan infrastruktur jaringan internet yang akan digunakan pada setiap TPS. Dukungan ini dapat berupa pemasangan perangkat tambahan agar penguatan sinyal di lokasi seperti TPS mendapatkan koneksi internet yang stabil guna kelancaran pada proses rekapitulasi menggunakan Sirekap. Melalui kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta ini diharapkan proses rekapitulasi di daerah yang sulit akses jaringan

internet dapat berjalan dengan optimal, sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu.

### **3.8. Upaya Mengatasi Kendala Penggunaan Aplikasi Sirekap**

Kendala kurangnya pengetahuan operator dalam penggunaan aplikasi Sirekap menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan input data, keterlambatan proses rekapitulasi, serta potensi kegagalan teknis yang dapat menghambat kelancaran tahapan pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerapkan berbagai upaya pelayanan guna memastikan kelancaran dan akurasi proses rekapitulasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang secara aktif menyelenggarakan sosialisasi pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi operator Sirekap, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelatihan ini mencakup pemahaman dasar dan teknis tentang penggunaan aplikasi SIREKAP, simulasi proses unggah dan validasi data untuk mengurangi kesalahan input, serta strategi pemecahan masalah saat terjadi kendala teknis. .

### **3.9. Implementasi Teori Governance**

Teori *governance* dalam perspektif “*Governance as theory five propositions*” karya (Stoker, 1998), menjelaskan bahwa terdapat lima implementasi yang menggambarkan bagaimana tata kelola pemerintahan

berkembang, salah satunya yaitu *governance* tidak hanya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, namun juga melibatkan stakeholder lainnya di dalamnya. Teori ini menekankan bentuk kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam menangani urusan publik. Dalam mengimplementasikan teori *governance* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang bekerja sama dengan berbagai aktor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengupayakan pelayanan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan sosialisasi pemilu berjalan efektif dan inklusif. Organisasi penyandang disabilitas berperan dalam membantu Komisi Pemilihan Umum menyampaikan informasi yang relevan bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan surat suara Braille dan aksesibilitas lainnya. Pemerintah desa, yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, turut serta dalam proses sosialisasi untuk memastikan informasi sampai ke setiap lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dilibatkan karena pengaruhnya yang besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Mereka berperan menyampaikan pentingnya partisipasi pemilu melalui forum keagamaan dan diskusi komunitas, sehingga pesan sosialisasi dapat diterima secara lebih luas dan menyentuh setiap individu. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya Telkom, untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah yang terbatas jaringannya. Kolaborasi ini bertujuan memastikan kelancaran pengunggahan

hasil rekapitulasi suara melalui aplikasi Sirekap, dengan menyediakan infrastruktur tambahan atau meningkatkan kualitas jaringan di lokasi-lokasi strategis, seperti TPS atau pusat akses internet. Terakhir, untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, Komisi Pemilihan Umum mengadakan pertemuan langsung dengan pemilih di tingkat desa, serta simulasi pemungutan suara dan diskusi interaktif. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pemilu, serta memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya atau menyampaikan kebingungannya. Dengan pendekatan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berupaya menciptakan pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, dan transparan, serta memastikan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerja sama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan pelayanan prima kepada masyarakat yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu.

### **3.10. Implementasi Pelayanan Prima**

Pelayanan prima merupakan upaya maksimal instansi atau perusahaan dalam memberikan layanan berkualitas, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Syah and Sulistiyani, 2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang berkomitmen dalam menjaga pelayanan dalam menyelenggarakan pemilu untuk memastikan agar proses pemilu berjalan dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang dalam melayani masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah menerapkan pelayanan prima yang menjadi aspek penting bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik, berikut implementasi pelayanan prima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan pemilu :

### **1. *Attitude* (Sikap)**

Prinsip yang menggambarkan bentuk sikap kepedulian petugas pelayanan dalam merespon kebutuhan masyarakat. Bentuk sikap kepedulian yang selalu diterapkan kepada para petugas atau karyawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pertama adalah sigap dalam mencari solusi jika terjadi suatu permasalahan. Selain itu para petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang juga selalu menerapkan bentuk kepedulian mereka dan terlibat aktif dalam mendukung jajaran dibawahnya seperti jika para petugas PPK atau PPS mengalami kesulitan, mereka langsung membantu dan turut menangani masalah yang ada, sehingga hal ini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam menangani masalah yang ada.

### **2. *Attention* (Perhatian)**

Prinsip ini mencerminkan bentuk perhatian penuh para petugas pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan layanan jika mereka membutuhkan bantuan. Pada prinsip ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berupaya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah sulit jangkauan untuk memastikan agar masyarakat di daerah tersebut mendapatkan hak pilihnya meskipun berada di wilayah terpencil yang aksesnya sulit.

### **3. *Action* (Tindakan)**

Prinsip ini merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan baik. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang selalu berupaya dalam mengambil tindakan nyata tidak hanya memberikan janji, tetapi membuktikan komitmennya dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Ketika mendapatkan laporan terkait permasalahan yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten segera mengambil tindakan cepat untuk segera mengambil langkah dalam menangani permasalahan tersebut.

### **4. *Ability* (Kemampuan)**

Kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan menekankan keterampilan, pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini harus dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang mencakup kompetensi dalam menangani sebuah permasalahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pemilu di berbagai tingkatan, yang mana hal ini mencakup pemahaman terkait prosedur pemungutan dan penghitungan suara, serta keterampilan dalam menangani aduan masyarakat menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

#### **5. *Appearance* (Penampilan)**

Kesan profesional yang ditampilkan organisasi ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penampilan fisik maupun non fisik. Prinsip ini mencakup penampilan petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti berpakaian yang rapi sesuai dengan standar pakaian dinas yang berlaku dan etika pegawai yang profesional saat melayani masyarakat.

#### **6. *Accountability* (Tanggungjawab)**

Bentuk tanggungjawab dalam memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan dan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai instansi

pemerintahan, harus memastikan bahwa pada setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu diambil berdasarkan regulasi yang berlaku, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang terhadap demokrasi.